

GUNAKAN MANAJEMEN SISTEM SATU ARAH

Uji Coba Malioboro Mulai Oktober

YOGYA (KR) - Rencana uji coba kawasan semi pedestrian Malioboro bakal segera dilakukan pada Oktober 2020 mendatang. Uji coba kawasan semi pedestrian tersebut sebagai langkah awal akan difokuskan pada penataan manajemen lalu lintas memakai sistem giratory atau satu arah penuh dengan modifikasi nantinya.

Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY Ni Made Dwipanti mengatakan uji coba kawasan semi pedestrian Malioboro untuk lalu lintasnya akan menggunakan sistem giratory pada Oktober 2020.

Manajemen lalu lintas dengan sistem giratory atau satu arah ini pasti akan memberikan berbagai dampak sehingga akan terus dikoordinasikan.

"Uji coba kawasan semi pedestrian Malioboro rencana dilakukan Oktober 2020, tetapi kita perlu konsolidasi intensif dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di DIY. Inilah yang seharusnya menjadi target 2020 dan akan menjadi penentu seperti apa kedepannya," kata Made kepada KR di Kompleks Kepatihan, Selasa (8/9).

Made menegaskan kawasan Malioboro menjadi tanggung jawab semua pihak, tidak hanya dari sisi transportasi tetapi bagaimana meng-create

sosial dan ekonomi agar berjalan seimbang dengan program pedestrian tersebut. Uji coba kawasan pedestrian Malioboro ini akan bebas dari kendaraan bermotor kecuali angkutan umum dan kendaraan tradisional dengan menggunakan sistem giratory penuh dengan modifikasi.

"Kita akan terapkan jalan satu arah di kawasan Malioboro seperti di Jalan Mataram, Jalan Abu Bakar Ali, Jalan Pasar Kembang, Jalan Bhayangkara dan sebagainya, kecuali Jalan KH Ahmad Dahlan yang akan tetap dua arah," tandasnya.

Kepala Biro Administrasi Per-ekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda DIY mengaku pihaknya mempersiapkan rencana uji coba kawasan semi pedestrian Malioboro tersebut harus matang. Untuk itu, pihaknya intensif berkomunikasi dengan Pemkot Yogyakarta, tidak hanya dari sisi teknis rekayasa dan manajemen lalu lintas saja tetapi sisi yang

lain termasuk dampak sosialnya agar tidak memunculkan friksi.

Pelaksana Harian Unit Manajemen Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Program Prioritas (TP5) DIY Rani Sjamsinansi menekankan yang utama perlu dicermati dalam uji coba semi pedestrian di Kawasan Malioboro adalah lalu lintas. Dari hasil uji coba kawasan semi pedestrian inilah yang diharapkan bisa menjawab perihalan manajemen lalu lintas yang akan diterapkan di kawasan Malioboro.

Rani mengungkapkan masyarakat belum terbiasa jalan kaki, berbeda dengan masyarakat di negara lain yang sudah terbiasa berjalan kaki terutama di tempat wisata. Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X pun mengharapkan implementasi kawasan semi pedestrian Malioboro itu berjalan ke arah Selatan dan jangan balik lagi sehingga berakhir disana.

"Bagaimana kita meminta dan masyarakat sendiri juga harus membiasakan jalan kaki agar bisa menikmati nilai atau value-nya. Sehingga tahap awal adalah menata manajemen lalu lintasnya karena pasti ada dampaknya. Biasalah setiap perubahan itu ada pro dan kontra," tegas Mantan Plt Sekda DIY ini. (Ira/Ria)-f



KR-Antara/Aloysius Jarot Nugroho/foc

TES DI PASAR HEWAN: Petugas kesehatan bersiap melakukan tes usap/swab test di Pasar Hewan Sunggingan, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (8/9). Akibat adanya indikasi positif Covid-19 di pasar tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali bekerja sama dengan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta melakukan tes usap kepada pedagang dan belantik sapi untuk memutus penyebaran Covid-19 di wilayah tersebut.

DANA BOS MADRASAH DAN PESANTREN

Tetap Naik Rp 100.000

JAKARTA (KR) - Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah dan Pesantren Tahun 2020 tetap naik Rp 100.000. "Saya tegaskan, Dana BOS Madrasah dan Pesantren Tahun 2020 tetap naik Rp 100.000 sesuai rencana awal," tegas Menteri Agama Fachrul Razi dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (8/9).

Anggaran BOS Madrasah dan Pesantren pada DIPA Kemenag Tahun 2020 direncanakan mengalami peningkatan unit cost. Untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI), naik dari Rp 800.000 persiswa (2019) menjadi Rp 900.000 persiswa (2020). Sementara Madrasah Tsanawiyah (MTs) naik dari Rp 1.000.000 persiswa (2019) menjadi Rp 1.100.000 persiswa (2020). Adapun BOS Madrasah Aliyah (MA) dan

MA Kejuruan (MAK), naik dari Rp 1.400.000 persiswa (2019) menjadi Rp 1.500.000 persiswa (2020). Total kenaikan anggaran Dana BOS Madrasah berjumlah Rp 874,4 miliar.

Alokasi yang sama untuk Pesantren Ula (setingkat MI), Wustha (MTs), dan 'Ulya (MA), anggarannya naik Rp 100.000 untuk setiap santri, sehingga total kenaikan Dana BOS Pesantren berjumlah Rp 16,47 miliar.

Menurut Fachrul Razi, waktu yang lalu rencana kenaikan ini tertunda. Seiring dampak Covid-19 dan adanya refocusing program, anggaran Kemenag mengalami pemotongan Rp 2,6 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 2,02 triliun diambil dari Anggaran Pendidikan Islam. (Ati)-f

PANDEMI COVID-19 MEMPRIHATINKAN

Daihatsu Perketat Protokol Kesehatan

JAKARTA (KR) - Dalam satu bulan terakhir, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah dalam jumlah yang sangat signifikan. Fakta ini sesuai informasi yang disampaikan Gugus Tugas Covid-19 di Indonesia.

Menanggapi kondisi yang memprihatinkan tersebut, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) memastikan pelaksanaan seluruh protokol kesehatan dilakukan secara maksimal di seluruh area kerja baik di Jakarta, Cibitung, maupun Karawang.

"Kami prihatin dengan peningkatan kasus baru Covid-19 ini. Daihatsu berkomitmen mendukung penerapan protokol kesehatan secara maksimal di seluruh area kerja kami," kata Yuni, Selasa (8/9).

Yuni menyebut klaster tenaga kesehatan paling dominan. Klaster-klaster lain dan pelaku perjalanan juga ada. "Di RSUD Sragen ada 400 nakes. Tiap hari ada 100 orang yang di-swab. Atas kondisi itu, kami minta masyarakat menaati protokol kesehatan," tandasnya. (Art/Sam)-f

ruh area, sehingga karyawan dapat bekerja dengan sehat dan aman," ujar Amelia Tjandra, Marketing Director dan Corporate Planning & Communication Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM), Selasa (8/9).

Dijelaskan Amelia Tjandra, ADM telah membuat sebuah aplikasi untuk memonitor pergerakan karyawan dan memastikan jarak antarkaryawan selalu dalam batas yang ditetapkan, yakni minimal 1,5 meter. Setiap karyawan ADM juga diwajibkan untuk melakukan deklarasi kesehatan secara mandiri dan rutin setiap harinya melalui aplikasi tersebut. (Imd)-f

PEMKOT MASIH CARI SHELTER REPRESENTATIF

OTG Merebak, Posko Bersama Diintensifkan

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya hingga kini masih mencari lokasi shelter yang representatif untuk memberikan pelayanan isolasi bagi orang tanpa gejala (OTG) konfirmasi positif Covid-19. Sembari mencari lokasi, keberadaan posko bersama akan diintensifkan seiring merebaknya kasus OTG.

Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi, menjelaskan isolasi mandiri akan lebih optimal jika dilakukan dalam shelter. Hal ini karena kebutuhannya bisa terjamin serta pergerakannya terus terpantau. "Orang tentu akan lebih nyaman isolasi di rumah karena bisa melakukan berbagai kegiatan di sana. Tetapi shelter atau penampungan perlu kami upayakan," terangnya, Selasa (8/9).

Kebutuhan shelter terbilang mendesak seiring

ing kebijakan pusat yang menyebutkan OTG tidak perlu dirawat di rumah sakit melainkan isolasi mandiri selama 14 hari. Pemda DIY juga meminta masing-masing kabupaten dan kota untuk menyiapkan shelter khusus bagi OTG.

Heroe menyebut, terkait posko saat ini sudah terbangun di wilayah Pandeyan. Dalam satu RT di sana terdapat 15 orang konfirmasi positif yang mayoritas OTG hasil penelusuran klaster penjual Soto Lamongan. "Posko ini digunakan bersama yang melibatkan gugus tugas wilayah untuk mengawasi rumah yang dijadikan isolasi mandiri. Di Kotabaru juga ada posko bersama camat, lurah dan koramil. Sembari mencari lokasi shelter, posko bersama bisa dibangun dengan memanfaatkan balai RW atau semacamnya," imbuhnya. (Dhi/Ira/Ria)-f

Perlu

Segala kebijakan diatur dari pusat sehingga kurang memberikan kesempatan pada petani untuk mandiri dalam mengembangkan kreativitas yang sesuai dengan kemauan dan kemampuan petani.

Selain itu, menurut mantan anggota

DPRD DIY ini, kebijakan pertanian tidak menempatkan petani sebagai subjek dan sebagai pengusaha kecil yang melakukan bisnis. Selain itu, kebijakan pertanian di daerah kurang memperhatikan efisiensi dan efektivitas secara ekonomi. "Kebijakan perta-

nian kurang memberikan fasilitas pnelitian pada komoditas penunjang industri atau usaha yang berorientasi ekspor atau substitusi impor misalnya pada gaplek, kapas, jagung dan lainnya," ujar Pimpinan Omah Tani. (Jon)-d

400 Ha

"Sampai saat ini tahapan pembahasan terus dilakukan dan baru sekitar 50 persen. Karena masih banyak usulan yang muncul," ujarnya.

Syam mengungkapkan, saat ini dari dinas terus melakukan konsolidasi dengan petani. Salah satu kebijakan yang diambil dengan memberikan insentif pada petani agar bisa lebih sejahtera. Dengan ini harapannya mereka tidak mudah menjual lahan pertaniannya.

Ketua Pansus Raperda Tentang Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2011, Agus Sumartono menilai Perda ini harus segera disahkan. Sebab dari kabupaten/kota belum memberikan data *by name by address* lahan pertanian yang berkelanjutan. Jika tidak segera disahkan, dikhawatirkan alih fungsi lahan akan semakin bertambah.

"Apalagi sekarang ini dinamika perkembangan infrastruktur di DIY

juga semakin besar. Tanpa aturan yang jelas maka akan mengancam keberadaan lahan pertanian DIY.

Belum lagi masalah kemiskinan yang paling besar terjadi di pedesaan. Dalam hal ini, para petani yang tidak memiliki lahan sehingga yang membuat mereka sulit berdaya. Perda baru nanti harus bisa lebih melindungi petani agar sejahtera," tegasnya. (Awh/Bro)-d

Wonosobo

Menurutnya, penambahan kasus positif Covid-19 di Wonosobo dimungkinkan masih terus terjadi. Tim gugus tugas masih menunggu ritsman hasil swab maupun terus mengirim specimen hasil swab baru yang merupakan penelusuran dari kontak erat dengan pasien positif Covid-19. Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Wonosobo telah mempersiapkan eks Gedung Akademi Keperawatan (Akper) Provinsi Jateng di Wonosobo menjadi tempat karantina pasien Covid-19. "Tiga rumah sakit, yakni RSUD KRT Setjonegoro, RSI Wonosobo, dan RS PKU Muhammadiyah, sudah penuh. Gedung Balai Latihan Kerja dan Sanggar Kegiatan Belajar yang dipersiapkan untuk

karantina pasien Covid-19 juga sudah penuh," jelas Riyatno.

Kepala BPBD Wonosobo, Zulfa Ahsan Alim menambahkan, sejauh ini persiapan pemanfaatan eks Gedung Akper Pemprov Jateng telah selesai dan siap digunakan untuk menampung pasien positif Covid-19. Gedung ini diproyeksi mampu menampung 60 pasien.

Sementara itu, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyampaikan status Kabupaten Sragen sudah masuk zona merah Covid-19. Lonjakan kasus positif yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir ini menjadi parameter yang membuat Sragen kini berubah jadi zona merah. "Bahkan 20 kecamatan yang ada

di Sragen statusnya juga sudah berubah dari oranye ke merah," kata Yuni, Selasa (8/9).

Disebutkan, dalam tiga hari terakhir ini angka penambahan positif korona mencapai 97 kasus. Rinciannya, Jumat (4/9) sebanyak 51 kasus, Sabtu (5/9) naik 40 kasus dan Minggu (6/9) tambah lagi 6 kasus. Total hingga Selasa (8/9), mencapai 338 kasus, dengan 18 meninggal dunia.

Yuni menyebut klaster tenaga kesehatan paling dominan. Klaster-klaster lain dan pelaku perjalanan juga ada. "Di RSUD Sragen ada 400 nakes. Tiap hari ada 100 orang yang di-swab. Atas kondisi itu, kami minta masyarakat menaati protokol kesehatan," tandasnya. (Art/Sam)-f

Hoaks

sehingga dipastikan saya dan ibu saya tidak ada kontak dengan almarhumah," terang Vivi kepada wartawan di tokonya, Selasa (8/9). Ia berharap kejadian tersebutnya informasi yang belum valid terkait kontak tracing tidak terulang kembali dan berharap penyampaian informasi harus satu pintu.

Kepala Puskesmas Gedongtengen Yogyakarta, dr Tri Kusumo Bawono SE yang mendampingi Vivi menyangkan informasi pelacakan (kontak tracing) pertama yang belum terkonfirmasi itu bocor dan tersebar di masyarakat. Terlebih lagi

informasi pelacakan tersebut dibumbui dengan broadcast tidak bertanggung jawab yang seolah-olah memberi kesan Malioboro tidak aman dikunjungi karena ada PKL yang meninggal setelah terinfeksi Covid-19. Untuk itu Tri Kusumo sebagai bagian dari Pemerintah Kota Yogyakarta, berkewajiban untuk meluruskan hoaks tersebut seraya mengedukasi masyarakat agar selalu bijak dalam menyikapi setiap berita yang diterima dengan berusaha melakukan cek dan ricek kebenarannya. Selain itu, pihaknya terus mengajak masyarakat untuk terus disiplin menerap-

kan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, rajin mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak dan tidak berkerumun.

"Akibat berita hoaks yang tersebar itu, Bu Vivi dan PKL lain mengalami dampak sosial yang cukup besar yaitu mendapat stigma negatif dan diskriminasi. Dengan adanya klarifikasi ini diharapkan suasana bisa kondusif. Kami memastikan bahwa Bu Vivi dan ibunya tidak pernah berhubungan dengan korban sehingga tidak termasuk dalam daftar kontak tracing," pungkasnya. (Dev)-d

Sport

Pada olah raga profesional pandemi Covid-19 berdampak besar pada ekosistem industri olah raga termasuk sektor pendukung turut terpuruk tak berdaya. Sedangkan pada olah raga amatir, dampak yang terjadi semua event olah raga baik internasional, nasional dan regional bahkan daerah terhenti dan dibatalkan. Sebuah kejadian historis karena baru kali pertama terjadi di sepanjang sejarah event olah raga selama ini. Para atlet kehilangan 'panggung prestasi' untuk bereksprosi dan para pelatih menjadi kehilangan kompetensinya. Sementara organisasi olah raga menjadi mati suri tanpa aktivitas.

Bila dikaji lebih dalam, dampak Covid-19 pada olah raga juga merembet kepada masalah sosial berupa hilangnya kohesi sosial dan berkurangnya kegembiraan sosial serta emosional para penggemar olah raga. Penutupan arena dan sarana olah raga menjadikan aktivitas fisik masyarakat menjadi sangat berkurang yang berkorelasi terhadap penurunan kebugaran fisik, psikis dan kesehatan masyarakat. Berkurangnya akses rutinitas olahraga mengakibatkan penurunan sistem kekebalan tubuh. Termasuk memper-

buruk penyakit yang berakar pada gaya hidup *low activity* serta berdampak pada kesehatan mental.

Untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19 pada bidang olah raga yang telah menjadi bagian budaya masyarakat maka beberapa hal dapat dilakukan. Pertama, pada tataran umum masyarakat awam dapat mengikuti rekomendasi World Health Organization (WHO) yaitu tetap menjalankan aktivitas fisik olah raga 75 menit perminggu (15 menit/hari). Manfaat olah raga berkala tersebut terbukti sangat membantu terutama pada saat cemas, krisis dan ketakutan. *Train from home* (TfH) tanpa peralatan dengan ruang terbatas masih dapat dilakukan seperti melakukan peregrangan, senam di tempat atau berlari di seputar rumah. Masyarakat yang memiliki akses internet dapat memanfaatkan fasilitas media daring seperti YouTube, mengikuti latihan olah raga secara virtual. Cara seperti ini mampu menjaga kebugaran dan kekuatan jasmani

Kedua, pemangku kepentingan olah raga dapat melaksanakan program pelatihan melalui sarana daring seperti fasilitas zoom dan media sosial berupa tutorial la-

hian dalam mempertahankan dan memelihara kondisi fisik. Situasi pandemi ini justru dapat dimanfaatkan untuk memperluas literasi program latihan dan kepelatihan oleh para kompeten kepada masyarakat awam melalui berbagai webinar/workshop secara daring.

Ketiga, meskipun tidak dapat dilaksanakan untuk semua nomor pertandingan dan semua cabang olah raga, kejuaraan secara virtual masih dapat dilaksanakan untuk terus memotivasi prestasi para atlet dan masyarakat yang berminat. Beberapa cabang olah raga seperti catur, panahan, karate dan sebagainya telah melaksanakan kejuaraan virtual ini. Namun yang harus diingat bahwa dalam kejuaraan virtual diunggulkan dan sportivitas sebagai semangat dalam olah raga harus tetap dijalanakan.

Karenanya semua induk cabang olah raga harus segera membuat regulasi resmi. Untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan kejuaraan virtual tersebut agar semangat kejayaan hakiki dalam olah raga dapat dipertahankan.

(Penulis adalah praktisi olah raga, Associated Profesor MIKOM UPN Veteran Yogyakarta)-d

Kejagung

Pihaknya mengklaim telah melaksanakan gelar perkara secara transparan. Bahkan, Kejagung turut meminta masukan dari lembaga-lembaga penegak hukum lainnya dalam penyelesaian perkara tersebut.

Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan, pihaknya belum akan mengambil alih penanganan kasus tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi yang melibatkan Djoko Soegiarto Tjandra dan jaksa Pinangki selama Kejagung memproses kasus itu secara transparan, akuntabel dan profesional. "Jika semuanya berjalan baik, profesional, kami tidak akan mengambil alih kasus," kata Karyoto.

Lebih jauh Karyoto menyebutkan, KPK melaksanakan tugas mengawasi penanganan perkara ini. Kedepulian Penindakan KPK juga telah menerbitkan surat perintah supervisi kasus dugaan korupsi yang menjerat Djoko dan Pinangki. Untuk itu, KPK akan melihat perkembangan

penanganan perkara itu. Mengenai untuk mengambil alih penyidikan kasus dari Kejagung, bila institusi ini tidak memenuhi syarat-syarat dalam penyidikan kasus tersebut, sebagaimana diatur dalam

Pasal 10A UU No 19 Tahun 2019. Oleh karena itu, dalam supervisi ini, dilihat apakah penyidikan yang sudah dilakukan Kejaksaan ini on the track atau tidak.

(Dhi/Ira/Ria)-f



Prakiraan Cuaca

Lokasi	Pagi	Siang	Cuaca Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	23-31	65-95
Sieman	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	23-31	65-95
Wates	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	23-31	65-95
Wonosari	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	23-31	65-95
Yogyakarta	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	23-31	65-95
Cerah	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]		
Berawan	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]		
Udara Kabur	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]		
Hujan Lokal	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]		
Hujan Pelir	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]		